

## **Kemiskinan : Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya** **Oleh : Maimun Sholeh<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap Negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik

Tulisan ini mencoba memaparkan pemikiran tentang kemiskinan, terjadinya kemiskinan, pengukuran kemiskinan dan indikator kemiskinan serta beberapa strategi penanggulangan kemiskinan

### **Kata Kunci :**

Kemiskinan, pengukuran kemiskinan, indicator kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan

### **A. Pendahuluan**

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan ada negara-negara sangat miskin mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya (Booth dan Sundrum, 1987).

. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang.

Sejak dilaksanakan pembangunan di Indonesia, jumlah penduduk miskin selama periode (1976-1996) telah mengalami penurunan secara drastis. Sebagai ilustrasi: periode (1976-1981) turun dari 54,2 juta jiwa (40,1%) menjadi 40,6 juta jiwa (26,9%); pada tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,1%); pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa atau (11,2%).

Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya.

---

<sup>1</sup> Dosen pada prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin melonjak kembali, tahun 1998 jumlah penduduk miskin tercatat menjadi 49,5 juta jiwa (24,23%) dan sedikit menurun pada tahun 1999 menjadi 47,9 juta jiwa atau mencapai 23,4 persen dari total jumlah penduduk.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,57 persen. Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 2.50 dan Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat 0.68.

**Tabel 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**  
**Menurut Daerah, 1996-2008**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,61	32,53	10,72	17,35	14,52

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**Tabel 2**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),**  
**Maret 2009-Maret 2009**

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</u></b>			
Maret 2008	2,07	3,42	2,77
Maret 2009	1,91	3,05	2,50
<b><u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</u></b>			
Maret 2008	0,56	0,95	0,76
Maret 2009	0,52	0,82	0,68

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 dan Maret 2009

**Tabel 3**  
**Disparitas Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Per Kabupaten 2009**

KODE	PROVINSI	% Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Kab/Kota	Disparitas Persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera Per Kabupaten/Kota			
				Yang terendah	%	Yang tertinggi	%
01	NANGROE ACEH DARUSSALAM	26.3	23	Kota Banda Aceh	1.3	Aceh Utara	38.6
02	SUMATERA UTARA	11.9	33	Binjai	0.7	Nias Selatan	61.8
03	SUMATERA BARAT	7.8	19	Kota Padang	2.5	Kep. Mentawai	51.8
04	R I A U	10.20	12	Kota Pekanbaru	0.7	Rokan Hulu	18.2
05	JAMBI	9.3	11	Kota Jambi	3.2	Merangin	15.4
06	SUMATERA SELATAN	16.9	15	Kota Pagar Alam	8.6	Banyuasin	30.9
07	BENGKULU	15.3	10	Kota Bengkulu	3.0	Seluma	23.9
08	LAMPUNG	37.4	10	Kota Metro	16	Way Kanan	51.5
09	DKI JAKARTA	0.8	6	Jakarta Pusat	0.0	Kep. Seribu	7.5
10	JAWA BARAT	20.6	26	Kota Depok	2.8	Karawang	36.6
11	JAWA TENGAH	31.6	35	Kota Surakarta	10.0	Grobogan	65.4
12	DI YOGYAKARTA	18.4	8	Kota Yogyakarta	8.4	Kulon Progo	36.1
13	JAWA TIMUR	24.6	38	Kota Madiun	1.9	Ngawi	58.3
14	B A L I	7.5	9	Gianyar	0.1	Karang Asem	18.3
15	NUSA TENGGARA BARAT	31.6	10	Lombok Utar	9.6	Lombok Tengah	40.8
16	NUSA TENGGARA TIMUR	58.3	21	Kota Kupang	23.3	Sumba Tengah	92.8
17	KALIMANTAN BARAT	6.4	14	Sekadau	1.1	Kayong Utara	23.8
18	KALIMANTAN TENGAH	12.3	14	Kota Palangkaraya	0.1	Kapuas	23.4
19	KALIMANTAN SELATAN	7.80	13	Banjarbaru	3.7	Tapin	13.5
20	KALIMANTAN TIMUR	9.3	14	Kota Samarinda	3.6	Kota Bontang	26.9
21	SULAWESI UTARA	18.70	15	Kota Palu	15.8	Bangkep	56.2
22	SULAWESI TENGAH	27.5	15	Kotamobagu	6.0	Kep. Sangihe	35.5

23	SULAWESI SELATAN	17.4	24	Soppeng	3.3	Janeponto	33.7
24	SULAWESI TENGGARA	37.4	12	Kota Kendari	19.9	Buton Utara	56.3
25	MALUKU	31.0	11	Kota Ambon	9.6	Seram Bagian Timur	66.6
26	PAPUA	48.6	29	Kota Jayapura	9.3	Pengunungan Bintang	94.2
28	B A N T E N	20.2	8	Tangerang	5.5	Pandegelang	29.6
29	BANGKA BELITUNG	3.2	7	Kota Pangkal Pinang	0.1	Belitung	8.5
30	GORONTALO	28.0	6	Kota Gorontalo	7.4	Pohuwato	41.2
31	MALUKU UTARA	28.3	9	Kota Ternate	3.3	Halmahera Barat	44.3
32	PAPUA BARAT	39.9	11	Kep. Raja empat	4.8	Teluk Bintuni	61
33	KEPULAUAN RIAU	7.9	7	Kota Batam	2.0	Natuna	23
34	SULAWESI BARAT	34.2	5	Polewali Mandar	25.3	Mamasa	77.9

Sumber : BKKBN 2009

## B. Konsep dan Indikator Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS yaitu ; terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (9) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (10) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (11) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (12) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (13) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (14) terbatasnya akses terhadap air bersih; (15) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (16) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (17) lemahnya jaminan rasa aman; (18) lemahnya partisipasi; (19) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (20) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Sementara itu jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998).

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun

sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adapt istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Adapun faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat menurut Sutyaastie Remi dan P. Tjiptoherijanto (2002) adalah pendapatan yang rendah. Jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan lain, dan tingkat pendidikan merupakan karakteristik dari keluarga miskin yang berhubungan dengan kemiskinan masyarakat.

### C. Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia

#### 1. Model Tingkat Konsumsi

Pada awal tahun 1970-an, Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.

Tabel 4  
Ekuivalen Konsumsi Beras

Kreteria	Pedesaan (kg/per orang/tahun)	Perkotaan (kg/per orang/tahun)
Melarat	180	270
Sangat Miskin	240	360
Miskin	320	480

Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari Sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan

dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan "garis kemiskinan" (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional). Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survey konsumsi dan belanja tingkat rumah tangga yang sebelumnya dimaksudkan untuk mencakup seluruh provinsi di Indonesia agar dapat memberikan gambaran tingkat nasional. Namun karena keterbatasan biaya dan tenaga, tahun 1963 dan 1967 Susenas hanya mencakup Jawa. Untuk tahun-tahun yang lain, termasuk tahun 1964/1965

Tapi sejak tahun 1981, karena adanya tambahan beberapa topik (modul), Susenas dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) Susenas Kor yang dibuat setiap tahun dan (b) Susenas Modul yang dibuat setiap tiga tahun. Susenas Kor menyajikan data yang umum seperti sayur, sedangkan Susenas Modul menyajikan data yang rinci, misalnya wortel<sup>15</sup>. Konsumsi masyarakat masuk ke modul dan dibuat setiap tiga tahun. Oleh karena itu setelah tahun 1980 data tingkat konsumsi tersedia pada tahun 1981, 1984, 1987, 1990 dan 1993. Sampai dengan 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional. Baru pada tahun 1990 dapat dilakukan pada tingkat provinsi, meskipun untuk beberapa provinsi kecil dilakukan penggabungan. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi secara keseluruhan.

Sebelum tahun 1993, jumlah sampel Susenas berubah dari waktu ke waktu. Empat Susenas yang pertama (1963, 1964/65, 1967, 1969/70) dan Susenas tahun 1978 dirancang untuk menghasilkan perkiraan nasional dan regional (gabungan beberapa provinsi), sementara ukuran sampel untuk tahun-tahun yang lain diyakini dapat mewakili tingkat provinsi. Sejak tahun 1993, ukuran sampel meningkat sampai dengan lebih dari 200.000 rumah tangga, dari 65.000 rumah tangga pada tahun 1992. Sebelum tahun 1992, sampel Susenas hanya di bawah 60.000 rumah tangga. Namun penambahan sampel tersebut hanya untuk kuisioner kor, sementara untuk kuisioner modul (termasuk konsumsi) jumlah sampel masih 65.000 rumah tangga. Sejak tahun 1999, dengan menggunakan data Susenas telah dihitung pula penduduk miskin pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi dengan sampel yang kurang.

Karena Susenas hanya dapat memprediksi angka kemiskinan sampai tingkat provinsi. maka untuk kabupaten yang menginginkan data yang lebih rinci dan lebih tepat di wilayahnya dapat membuat Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Barat. Suseda tidak dibuat secara teratur, melainkan dibuat atas dasar permintaan pemerintah kabupaten atas biaya pemerintah kabupaten sendiri yang dijalankan oleh BPS. Pada prinsipnya metodologi Suseda sama dengan Susenas hanya saja jumlah sampel jauh lebih banyak.

## 2. Model Kesejahteraan Keluarga

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga.

Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)
- Keluarga Sejahtera I (miskin)
- Keluarga Sejahtera II
- Keluarga Sejahtera III
- Keluarga Sejahtera III plus

Tahapan Pra Sejahtera;

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.

Tahapan Keluarga Sejahtera I;

Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:

- (1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;
- (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- (6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tahapan Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 s/d 6) dan indikator berikut;

- (7) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- (8) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur;
- (9) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
- (10) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah;
- (11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
- (12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
- (13) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin;
- (14) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Tahapan Keluarga Sejahtera III ;

Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II (Indikator 1 s/d 14) dan indikator berikut;

- (15) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
- (16) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
- (17) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
- (18) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
- (19) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus;

Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sewjahtera III (Indikator 1 s/d 19) dan indikator berikut;

(20) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;

(21) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

### 3. Model Pembangunan Manusia

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu United Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara.

Pemerintah Indonesia lewat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut mengembangkan model ini. HDR yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai "Pembangunan Manusia Seutuhnya". Laporan terakhir adalah laporan tahun 2004 yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu Index Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI).

Human Development Report (HDR) adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini, juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.

Pendekatan pembangunan manusia (HDR) jelas berbeda dengan pendekatan-pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjadikan manusia sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada sebagai tujuan. Pembangunan kesejahteraan masyarakat seringkali

melihat masyarakat sebagai penerima manfaat daripada sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Indikator-indikator dalam HDR dapat dikelompokkan ke dalam enam dimensi. HDI, HPI dan GDI menggunakan tiga dimensi yang sama, yaitu:

- Umur yang panjang dan hidup sehat
- Pengetahuan
- Standar hidup yang layak

Sedangkan indikator-indikator pada GEM menggunakan tiga dimensi yang berbeda yaitu:

- Partisipasi politik
- Partisipasi dalam ekonomi dan pengambilan keputusan
- Memiliki kekuatan dalam sumberdaya ekonomi

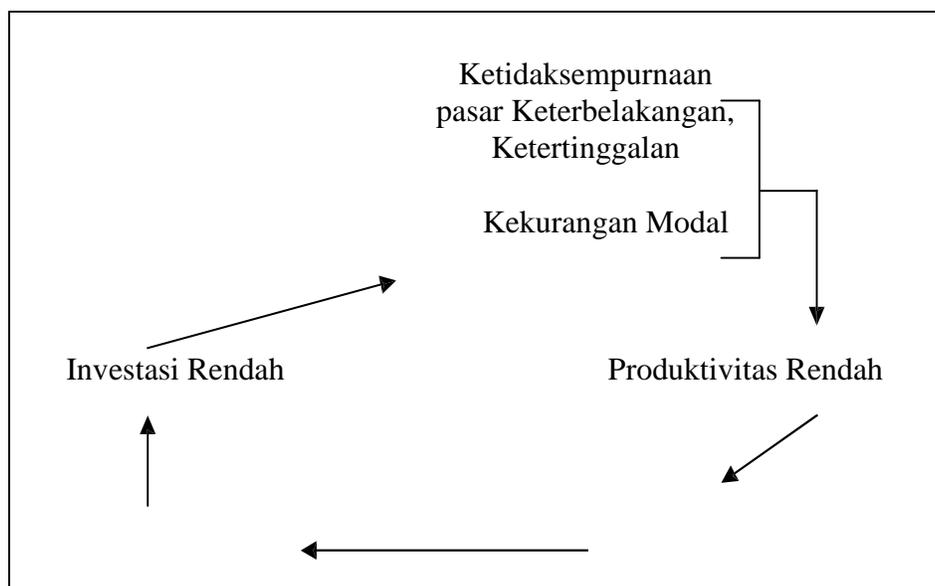
#### D. Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse.. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat. Untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi. Masalahnya adalah, dari mana modal itu diperoleh ? jawabnya adalah, utang dari luar.

Jadi adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (gambar 1.).

Gambar .1.

Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)



Ada dua macam konsep kemiskinan yang umum dikenal antara lain :

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan ini selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*). Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

- a. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan ini tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Sebagai analogi adalah seseorang yang tinggal di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki *income* yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, tetapi *income*-nya masih jauh lebih rendah dari rata-rata *income* masyarakat sekitarnya. Orang atau keluarga tersebut merasa dirinya masih miskin. Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan oleh lingkungannya.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.

### **E. Strategi Penanggulangan Kemiskinan :**

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (base data) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998). Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997). Arah baru strategi pembangunan diwujudkan dalam bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Untuk merealisasikan arah baru pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan model pembangunan partisipatif yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (*good governance*). Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Berdasarkan model pembangunan tersebut, suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang disertai tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya. Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin, (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin, dan (3) dimensi perekonomian rakyat. Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Untuk ini perlu adanya keterpaduan antarkelembagaan di daerah kabupaten- kota hingga tingkat desa, yaitu; antara kelembagaan pemerintah-politik, kelembagaan ekonomi-dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan pemerintah, bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,

sehingga masyarakat banyak (rakyat), dapat memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya setempat dan dalam sistem pengambilan keputusan. Kelembagaan ekonomi, didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Di samping ke tiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat difungsikan sebagai katalisator dan fasilitator dari pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat. Strategi jangka pendek, antara lain adalah: (1) identifikasi masalah kemiskinan; (2) mengkaji potensi yang dimiliki baik SDA, SDM, teknologi, dan kelembagaan yang ada; (3) identifikasi kendala dan permasalahan pokok dalam penanggulangan kemiskinan baik kendala teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan; (4) identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari ketiga kelembagaan yang ada; (5) koordinasi dan sinkronisasi program antardinas atau instansi pemerintah terkait baik secara vertikal maupun secara horisontal; (6) konsistensi antara program/kegiatan dengan alokasi anggaran; (7) pembagian peran antara ketiga kelembagaan; (8) menentukan kelompok sasaran dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan monev program pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif. Strategi jangka panjang: (1) membentuk KPK di daerah yang mempertemukan ketiga kelembagaan yang saling terkait; (2) melakukan kajian bersama terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di daerah dan kajian kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan (3) merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan program jangka panjang sehingga program tersebut berkelanjutan dan berhasil memberdayakan kelompok masyarakat miskin menjadi kelompok masyarakat yang maju, produktif, dan mandiri.

Di samping beberapa strategi di atas, Tri Pranadji (2003) memberikan beberapa alternatif strategi yang bisa dipertimbangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain adalah: (1) Strategi Charitas (SC), yaitu suatu strategi yang diarahkan langsung untuk menutupi gejala ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi gejala kurang pangan dan gizi pada anak balita dan ibu menyusui dengan pemberian materi pangan yang sesuai berharga murah atau gratis; (2) Strategi Produksi (SP), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memproduksi bahan pangan sendiri (seperti: padi atau jagung); (3) Strategi Ekonomi (SE), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya setempat di suatu wilayah; (4) Strategi Perbaikan Agroekosistem (SPA), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi agroekosistem yang rusak dan tidak sehat; (5) Strategi Sosio Budaya (SB), yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperbaiki tatanan masyarakat berpenghasilan rendah secara khusus dan masyarakat luas dalam arti lebih umum.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan;

3. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain.

PNPM-Mandiri merupakan program andalan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Disadari bahwa penanggulangan kemiskinan akan dapat mencapai hasil yang optimal jika telah mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu program yang akan dijalankan didasarkan pendekatan yang mampu mendorong masyarakat untuk turut serta secara proaktif dalam program tersebut. Untuk mendukung upaya tersebut maka pendekatan yang ditempuh adalah berbasis kecamatan sebagai lokus program Masyarakat sebagai pelaku utama, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah serta menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.

Khusus PKH, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dikenal sebagai bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG,s). Setidaknya terdapat 5 Komponen MDG's yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH yaitu:

1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan
2. Pendidikan Dasar
3. Kesetaraan Gender
4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita
5. Pengurangan kematian ibu melahirkan STRATEGI KOMUNIKASI

## **F. Penutup**

Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 32,530 juta jiwa atau 14,15% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 2.50 dan Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat 0.68.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya

tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang, mendorong perkembangan investasi pertanian dan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh kredit usaha yang mudah, memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai, memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama.

Kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil dan harus menggunakan paradigma keberpihakan kepada orang miskin

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua dan Adi Sasono 1981, Indonesia : Ketergantungan Dan Keterbelakangan, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan
- Baran, Paul, 1957. Political Economy Of Growth, New York : Monthly Review Press
- BAPPENAS, -----
- BKKBN, 2009. Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009, BKKBN, Jakarta
- Bobo, Julius. 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat. PT Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Booth, A. dan R.M. Sundrum. 1987. Distribusi Pendapatan, dalam A. Booth dan P.McCawley (Eds.) Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES
- BPS. 2004, Data Dan Informasi Kemiskinan, Jakarta
- BPS. 2009. Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009, Jakarta . Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS-Statistic Indonesia, Bappenas, and UNDP. 2004. The Economics of Democracy: Financing
- Deliarnov, 2005. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Prada
- Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Erlangga
- Ditjen PMD, Depdagri. 2004. Rekapitulasi Pembentukan KPK Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta

- Giddens,Anthony, 1986 , Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Jakarta: UI Press
- Gilpin,Robert dan Gilpin, Jean Millis. 2002, Tantangan Kapitalisme Global. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Human Development in Indonesia. BPS-Statistic Indonesia, Bappenas, and UNDP.
- Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith.2003, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga,
- Mubyarto .1993, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan.Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto, 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM Yogyakarta.
- Mubyarto.2000, Membangun Sistem Ekonomi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPF
- Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa, Yayasan Obor Indonesia.
- Saptana, Tri Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi Bali dan Bengkulu). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sarman Mukhtar dan Sajogyo.2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia, Puspa Swara.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Grasindo, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS, PT Gramedia, Jakarta
- Suparlan, Parsudi (Ed), 1993, Kemiskinan Di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta